



Kerja Sama Regional dalam Rantai Pasokan Pertanian untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Studi kasus ASEAN

Putri Saviera Quaralia

Jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Indonesia; putri.quaralia@binus.ac.id

| Dikirim: 03-01-2022

| Diterima: 17-01-2022

| Dipublikasikan: 30-01-2022

Keywords

Regional cooperation, agricultural supply chain, food security, ASEAN, international regime.

ABSTRACT

The agricultural sector has a very complex chain, agricultural supply plays an important role in providing food access from producers to markets. However, at the same time this sector is facing challenges, the agriculture is one of the sectors most vulnerable to the impact of the pandemic because it is closely related to key economic factors such as global trade in the region, and more importantly in terms of supply and demand of community food security. This article discusses regional cooperation in agricultural supply chains, for preventing the spread of COVID-19, pandemic has disrupted agricultural supply chain management, this study uses a case study of the ASEAN Region. It is hoped that the management of agricultural supply chains in the ASEAN Region will continue to run well through the cooperation carried out to achieve sustainable food security in ASEAN member countries. Furthermore, this study uses the international regime theory in explaining the establishment and maintenance of collaboration in the agricultural sector to achieve food security in ASEAN. This study uses qualitative and descriptive methods by reviewing literature sources to support the purpose of writing articles

Kata Kunci

Kerja sama regional, rantai pasok pertanian, ketahanan pangan, ASEAN Internasional rezim

ABSTRAK

Sektor pertanian memiliki rantai yang sangat kompleks, pasokan pertanian memainkan peran penting dalam menyediakan akses pangan dari produsen ke pasar. Namun, pada saat yang sama sektor ini menghadapi tantangan, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling rentan terkena dampak pandemi karena sangat terkait dengan faktor ekonomi utama seperti perdagangan global di kawasan, dan yang lebih penting dalam hal pasokan dan ketahanan pangan masyarakat. Artikel ini membahas mengenai kerja sama regional dalam rantai pasok pertanian, sebab pencegahan penyebaran COVID-19 telah mengganggu manajemen rantai pasok pertanian, penelitian ini menggunakan studi kasus Kawasan ASEAN. Diharapkan manajemen rantai pasok pertanian di Kawasan ASEAN tetap berjalan dengan baik melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan demi mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di negara-negara anggota ASEAN. Penelitian ini menggunakan teori internasional rezim dalam menjelaskan pembentukan dan penjagaan kolaborasi dalam sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dengan mengkaji sumber literatur demi menunjang tujuan penulisan artikel.

PENDAHULUAN

Ancaman keamanan pangan telah menjadi isu prioritas yang harus diperhatikan masyarakat global (Paloviite, 2017). Dalam dekade terakhir, dapat kita saksikan sektor pertanian mengalami peningkatan pesat. Namun di beberapa negara bagian di dunia, khususnya negara berkembang masih mengalami *food insecurity*, mereka mengalami kelaparan, dan kekurangan akses terhadap makanan bergizi. Keadaan ini diperparah lagi dengan kondisi pandemik COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019. Hingga saat ini, ketahanan pangan tetap menjadi isu global dan menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Ketahanan pangan menjadi topik berbincangan yang semakin luas. (Hirawan & Verselita, 2020) (Okitasari, Kasih, Mauliddina, & Safrudin, 2021) (Janakiraman, 2021). Pada Kawasan ASEAN, pertanian menjadi salah satu sektor utama dan paling penting (ERIA, 2012). Dalam kondisi seperti ini, mewujudkan ketahanan pangan menjadi salah satu isu sentral global. Maka dari itu, mewujudkan penyelenggaraan rantai pasokan makanan yang efektif dan efisien sangat penting dan dibutuhkan. (Beddington, et al., 2012) (Hirawan & Verselita, 2020). Namun pandemik ini telah memaksa negara-negara untuk menghentikan kegiatan ekonomi, pengurangan atau *lockdown*, serta penurunan produksi dan distribusi pada pertanian.

Saat kondisi pandemik saat ini, ASEAN mengalami tantangan pada berbagai sektor termasuk pertanian. Komoditas pertanian dan pangan merupakan salah satu sektor yang paling rentan karena sangat terkait perdagangan integrasi regional dan gangguan logistik, dan yang lebih penting ketahanan pangan berkelanjutan (ERIA, 2020). Gangguan pada logistik membatasi mobilitas pekerja untuk menjalankan tugas mereka dalam mengoperasikan produksi pangan. Lingkup rantai pasokan pertanian mengintegrasikan banyak peserta didalamnya, misalnya, produsen, petani, produsen, pedagang, dan konsumen (Sjah & Zainuri, 2020). Pekerja tidak

dapat bertani dan memanen produk mereka, dan pergerakan produk di sepanjang rantai pasokan makanan menjadi tertunda (Lambert, Elamin, & Cordoba, 2020). Manajemen rantai pasok merupakan pendekatan holistik (secara keseluruhan) dan strategis dalam hal permintaan, operasional, pembelian, dan manajemen proses logistik yang bergerak secara kompleks serta melibatkan berbagai aktor di dalamnya (Sitorus & Sitorus, 2017).

Rantai pasok memegang peranan penting bagi sekarang, masa depan bisnis dan dunia secara keseluruhan, hal ini sejalan dengan berkembang Isu pembangunan. Seluruh aspek diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan dan kaitan dengan rantai pasokan global, dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan membutuhkan sistem pangan yang inklusif, berkelanjutan, efisien, bergizi, dan sehat (Banker, 2021). Di tengah pandemik, di KTT Pemimpin G20 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kerajaan Arab Saudi, menyatakan bahwa anggota G20 mengupayakan dalam menjaga rantai pasokan makanan tetap hidup dan mendorong negara-negara untuk terus menggunakan perdagangan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan keberlanjutan petani (Partogi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama dan kolaborasi dalam ketahanan pangan perlu dilakukan. Ketahanan pangan dapat didefinisikan dalam istilah sistem pangan berkelanjutan di mana tujuan akhirnya adalah memberi makan semua orang secara berkelanjutan, adil, dan sehat. Sistem pangan berkelanjutan memenuhi kebutuhan ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas, beragam, ramah lingkungan, dan tangguh, serta membangun kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan generasi mendatang. Dan ketika ada masalah dalam kapabilitas rantai pasok pangan maka itu menjadi prioritas bagi keamanan dan keselamatan pribadi individu

dan bangsa (Paloviita, 2017; Weightman & Bourlakis, 2004).

Koordinasi internasional dalam rantai pasok pangan perlu mendapat perhatian serius, Integrasi regional dapat membantu menghasilkan skala ekonomi untuk rantai pasokan dan membantu negara-negara menemukan apa yang dapat dihasilkan dan didapatkan (Ponciano S. Intal, Oum, & Simorangkir, 2011) dalam rangka meningkatkan keterpaduan proses produksi dan keterpaduan antar pelaku usaha dalam rangka mencapai ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan (Saptana & Ilham, 2017). Tiap negara memiliki dan ingin meningkatkan produksi pertanian mereka dan sejauh mana hal tersebut dapat berimplikasi pada pola perdagangan global serta regional, hal ini mendorong terciptanya hubungan dan penyebaran informasi dari negara-negara (KPMG International, 2013). ASEAN sebagai organisasi kerjasama intra-regional menghadapi masalah dalam ketahanan pangan, sebanyak 14,4 miliar anak di bawah 5 tahun mengalami pengerdilan tumbuh pada tahun 2018 (UNICEF, WHO, World Bank Group, 2019), salah satu penyebabnya adalah kurangnya akses pada pangan bernutrisi; pertanian.

Rendahnya tingkat perdagangan antar-regional menjadi salah satu bukti hambatan dan tantangan dalam pertanian suatu negara, seperti yang terjadi di Afrika tahun 2009 (KPMG International, 2013). Bahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama yang paling sering terjadi dalam rantai pasok adalah terdapatnya masalah biaya (Adrianta, M.Simatupanga, & Handayat, 2021). Oleh karena itu, kajian yang terkait dengan kerja sama regional dalam kinerja rantai pasok pangan demi terwujudnya pangan berkelanjutan sangat diperlukan. Artikel ini berupaya untuk mengkaji “Bagaimana kerja sama regional ASEAN dalam proses rantai pasok makanan untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan?”. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerja sama global tingkat regional dalam menjalankan roda rantai

pasok pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Tulisan ini terbagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama, mengenai proses manajemen rantai pasok pertanian berjalan serta unsur-unsur yang mempengaruhi keberjalanan rantai pasok. Dilanjut pada bagian kedua membahas kondisi pertanian dan pangan di ASEAN, bagian ini membahas bagaimana dampak akibat pandemik COVID-19 bagi rantai pasok pertanian dan pangan di ASEAN. Bagian ketiga membahas rezim pangan global berjalan. Dilanjutkan bagian selanjutnya, kerja sama regional ASEAN dalam rantai pasok pertanian. Bagian akhir membahas pengaruh rantai pasok pertanian dalam mendukung pangan berkelanjutan. Diharapkan tulisan ini

KERANGKA KONSEPTUAL

Teori Rezim Internasional

Teori rezim membantu menjelaskan munculnya interaksi kompleks antara negara, organisasi, perusahaan, dan lembaga lain serta potensi ide atau perilaku untuk membentuk suatu sistem internasional (Meiches & Hopkins, 2012). Teori rezim internasional menunjukkan bahwa kerja sama dimungkinkan dalam lingkungan di mana tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk memaksa negara-negara untuk bekerja sama (ARI, 2018). Teori internasional rezim telah menyediakan penjelasan dan pendekatan tradisional tentang tatanan internasional, termasuk diantaranya teori stabilitas hegemonik atau neorealisme, dengan menjelaskan munculnya kerja sama dan organisasi dalam apa yang secara tradisional dianggap sebagai kondisi yang anarkis atau sangat tidak terduga. Pendekatan umum lainnya untuk teori rezim adalah realisme, neoliberalisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Bagian dari kekuatan teori rezim adalah bahwa teori itu tetap merupakan konsep yang bersifat lebih elastis untuk digunakan menjelaskan berbagai isu dan telah digunakan untuk menganalisis keragaman masalah yang sangat besar, dengan banyak efek dan perkembangan yang menjanjikan (Meiches & Hopkins, 2012).

Menurut Keohane (1993:23), teori rezim adalah teori untuk menjelaskan dan memahami kerja sama internasional yang bertujuan untuk koordinasi dan harmonisasi kepentingan antar negara. Bahkan, kerja sama internasional yang berarti saling mengharmoniskan kebijakan yang menguntungkan semua pihak banyak terlihat dalam politik dunia. Bahkan beberapa dari kerja sama ini mungkin merupakan hasil pemaksaan vertikal dari atas ke bawah, tetapi kebanyakan dari mereka adalah seperti jenis kerja sama horizontal karena kesepakatan bersama (ARI, 2018). Pendefinisian teori "rezim internasional" sebagai "satu set prinsip, aturan, norma, dan prosedur pengambilan keputusan implisit maupun eksplisit, di mana kepentingan dan harapan para aktor bertemu di area hubungan internasional yang terkait dengan bidang/subyek isu tertentu" (ARI, 2018; Peterson, 2012). Sekarang ada banyak rezim internasional baik di dalam maupun di seluruh area masalah dan isu global. Penyelidikan tentang dampak keberadaan rezim internasional dimulai dengan efektivitas: pada tingkat apakah kepatuhan terhadap prinsip, norma, dan aturan rezim terjadi, rezim memfasilitasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk dikembangkan (Peterson, 2012). Menurut Krasner, rezim adalah peraturan yang dihasilkan dari kerja sama sukarela pemerintah. Oleh karena itu, rezim dapat menjadi alasan dan hasil yang menentukan dan mempengaruhi perilaku. Sehubungan dengan itu, dalam suatu sistem negara berdaulat, salah satu fungsi dasar rezim adalah mendorong negara-negara untuk bekerjasama dalam suatu bidang tertentu.

Rezim dianggap sebagai hasil dari persetujuan negara dan penyerahan terbatas untuk otoritas pengambilan keputusan yang independen. Struktur domestik adalah contoh terbaik bagi mereka, sedangkan negara adalah institusi yang diciptakan oleh individu yang menyerahkan kekuatan tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri dan mencapai keamanan. Dalam rezim internasional, dengan cara yang sama, negara memiliki tugas dan

tanggung jawab untuk melakukan kewajiban bagi mereka yang melanggar tanggung jawab bersama. Tujuan dari rezim adalah untuk membentuk kerangka dalam memfasilitasi solusi masalah melalui perjanjian. Namun istilah "teori rezim" menyesatkan karena para penulis edisi khusus memperlakukan istilah "rezim internasional" sebagai sebuah konsep, khususnya sebuah konsep yang menyebutkan jenis fenomena tertentu yang dapat diamati dalam politik dunia. Satu-satunya cara saya dapat menafsirkan frasa "teori rezim" yang konsisten dengan maksud penulis tahun 1982 (termasuk kritikus yang ditunjuk Susan Strange) adalah dengan menganggapnya sebagai versi singkatan dua kata dari frasa yang lebih panjang "teori rezim internasional." Menggunakan "rezim" sebagai kata sifat yang terkait dengan kata benda "teori" menunjukkan bahwa orang yang mempelajari rezim internasional berusaha untuk menghasilkan sekolah analisis yang berbeda dan cukup terpadu yang fokus pada politik dunia atau hubungan internasional dengan cara tertentu (Peterson, 2012).

METODE RISET

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam pendekatan studi ini, penulis menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dengan mengumpulkan beberapa data dan analisis deskriptif melalui studi literatur tentang implementasi kerja sama regional ASEAN dalam rantai pasok pertanian. Dengan mengumpulkan data dan analisis deskriptif melalui studi literatur yang ada, informasi tentang dampak rantai pasok pertanian dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan upaya pertahanan ketahanan pangan dapat diperoleh. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi manajemen rantai pasok makanan untuk menjelaskan hubungan kerja sama regional dapat mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di Kawasan ASEAN.

Dengan menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan seakurat mungkin tentang keadaan objek yang diteliti dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemui dengan menggunakan data kualitatif tentang kerja sama yang terjadi tentang rantai pasok pertanian di ASEAN. Penelitian kualitatif terdiri dari metode berikut: logika, etnografi, analisis wacana, studi kasus, observasi partisipan, *grounded theory*. Eksplorasi, dan upaya ini untuk menjelaskan 'bagaimana' dan 'mengapa' dari suatu fenomena sosial, atau program, beroperasi seperti yang dilakukan dalam konteks tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Rantai Pasok Pertanian dan Pangan

Manajemen rantai pasokan memiliki definisi sebagai perwakilan langsung dari manajemen rantai permintaan di mana produksi, penanganan, pemrosesan manufaktur, dan distribusi serta pemasaran disesuaikan dan dirancang untuk memenuhi keinginan konsumen. Ada tingkat ketidakpastian yang tinggi untuk kualitas dan keamanan produk makanan dibandingkan dengan biaya transaksi yang didorong pasar seperti informasi, negosiasi, atau pemantauan (Accorsi & Manzini, 2019). *Supply Chain Management* dapat digambarkan sebagai pendekatan manajemen holistik untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan aliran material, informasi, dan keuangan di sepanjang rantai pasokan. Selanjutnya, ini termasuk pengelolaan antarmuka antara mitra yang terlibat dalam rantai ini, terutama dari sudut pandang manajemen informasi dan teknologi. (Sweeney & Waters, 2021). Rantai pasokan pangan dan makanan memiliki hubungan dan saling beririsan.

Manajemen rantai pasokan pertanian berkembang sebagai disiplin penelitian tersendiri. Ini mencakup arena lokal, regional, nasional dan internasional. Rantai pasokan makanan adalah proses terkelola, kombinasi pengetahuan dan keterampilan, mencakup

elektronik, biologi, ilmu sosial ekonomi, perilaku manusia, psikologi, dan banyak lagi. Manajemen rantai pasokan makanan bertujuan untuk memastikan pasokan produk yang aman dan sehat yang sepenuhnya dapat dilacak dari 'farm to fork'. Rantai pasokan makanan telah berkembang dari serangkaian transfer yang lebih pendek dan independen menjadi hubungan yang lebih terintegrasi dan koheren antara produsen, pengolah, produsen, dan pengecer.

Rantai pasokan makanan adalah proses terkelola, kombinasi pengetahuan dan keterampilan, mencakup elektronik, biologi, ilmu sosial ekonomi, perilaku manusia, psikologi, dan banyak lagi. Manajemen rantai pasokan makanan bertujuan untuk memastikan pasokan produk yang aman dan sehat. Rantai pasokan makanan telah berevolusi dari serangkaian transfer yang lebih pendek dan independen menjadi hubungan yang lebih terintegrasi dan koheren antara produsen, pengolah, produsen, dan pengecer (Bourlakis & Weightman, 2004). Rantai pasokan pangan dan pertanian lebih sulit dikelola daripada bidang lainnya, karena sebagian besar produk dapat membusuk dan memerlukan sistem yang dikontrol oleh suhu. Terdapat kira-kira sepertiga dari makanan dunia yang diproduksi untuk konsumsi manusia yang hilang atau terbuang. Rantai pasok makanan ini bersifat kompleks dan terus berubah. Dengan desain jaringan rantai pasokan yang efisien, arus produk dan biaya transportasi dapat menurun, maupun keamanan pangan dapat meningkat (Accorsi & Manzini, 2019). Manajemen rantai pasok (*Supply Chain Management/SCM*) tercakup dalam koordinasi dan integrasi semua aliran barang dan uang dari semua pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok. Pengaturan aliran produk (barang), keuangan, dan informasi dalam rantai pasok merupakan hal dan unsur penting dalam suatu komoditas pangan (ternak dan pertanian) disebabkan oleh cukup banyaknya pelaku usaha yang terlibat, karakteristik produk pertanian yang mudah rusak, serta seringnya harga pertanian mengalami fluktuasi dan pada periode tertentu

mengalami kenaikan harga yang tinggi (Saptana & Ilham, 2017).

Perencanaan dan penjadwalan produksi adalah bagian penting dari manajemen rantai pasokan, sebagian besar mempertimbangkan keputusan taktis dan operasional pada antarmuka antara penjualan dan operasional. Dalam produksi makanan, kegiatan penyiapan sebagian besar mencakup pada kegiatan pembersihan yang signifikan, penggunaan energi, air, dan bahan pembersih untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya, aktivitas *setup* sering dikaitkan dengan pemborosan produk. (Accorsi & Manzini, 2019). Sistem pangan mencakup semua tahapan rantai pasokan pangan (FSC) yang diperlukan untuk memberi makan populasi: menanam, memanen, mengemas, memproses, mendistribusikan, mengonsumsi, dan membuang.

Rantai pasokan pertanian mengacu pada sistem yang mencakup semua kegiatan, organisasi, pelaku, teknologi, informasi, sumber daya, dan layanan yang terlibat dalam memproduksi produk pertanian pangan untuk pasar konsumen. Meliputi sektor hulu dan hilir pertanian mulai dari penyediaan input pertanian (seperti benih, pupuk, pakan, obat-obatan, atau peralatan) hingga produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, transportasi, pemasaran, distribusi, dan ritel. Mereka juga mencakup layanan pendukung seperti layanan penyuluhan, penelitian dan pengembangan, serta informasi pasar. Dengan demikian, mereka terdiri dari berbagai perusahaan, mulai dari petani kecil, organisasi petani, koperasi dan perusahaan rintisan hingga MNE melalui perusahaan induk atau afiliasi lokal mereka, badan usaha milik negara dan dana, pelaku keuangan swasta dan yayasan swasta. Beberapa aktor telah memasuki sektor ini dalam beberapa tahun terakhir. Struktur rantai pasokan dan perusahaan yang terlibat pada setiap tahap sangat bervariasi di seluruh produk dan geografi.

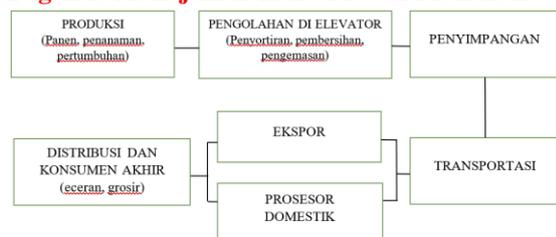
Produk merupakan kunci rantai pasokan pertanian, dan ketidakpastian tingkat produk

apa pun akan sangat melemahkan manfaat integratif dalam rantai pasokan yang mengandalkan pasokan atribut produk tertentu kepada pengguna akhir melalui originasi. Para pedagang yang membeli secara oportunistik dengan fleksibilitas asupan produk sedang melakukan akumulasi yang tidak ada perjanjian jual beli perdagangan komersial. Hasilnya sering kali dapat tertundanya penjualan produk tanaman lama yang memburuk dengan penjualan pilihan terakhir dengan harga diskon (Williams, 2014). Proses produksi dan distribusi pangan telah berkembang secara bertahap, didukung oleh sumber energi yang murah dan bahan bakar fosil. Tanaman dan pertanian meningkatkan hasil mereka karena munculnya kimia hijau, dan sistem penyimpanan dan transportasi baru membuat makanan lebih murah, lebih aman, dan lebih terjangkau. Orang-orang berhenti bermigrasi ke ekosistem yang subur dan membentuk pola baru untuk produksi dan distribusi pangan dalam skala besar. Makanan dikirim ke seluruh negara melalui operasi pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi yang melibatkan banyak pelaku dan jaringan logistik (Accorsi & Manzini, 2019). Mereka dapat memaksakan standar dan spesifikasi pada produsen dengan sedikit keterlibatan di luar kontrak pembelian. Tetapi mereka juga dapat lebih aktif terlibat, terutama melalui pertanian kontrak, untuk mengkoordinasikan produksi dan memastikan kualitas dan keamanan. Misalnya, koperasi sering memiliki atau mengelola peralatan pertanian serta aset hilir (misalnya pabrik gula) dan dengan demikian dapat dianggap tidak hanya sebagai perusahaan pertanian tetapi juga sebagai perusahaan hilir. Dengan melakukan pengukuran kinerja memungkinkan dapat melakukan perbaikan rantai pasok sehingga dapat dioperasikan dengan efektif dan efisien. Rantai pasokan (*supply chain*) sebagai suatu sistem tempat organisasi yang mengalirkan barang produksi dan jasa kepada pelanggannya (Saptana & Ilham, 2017).

Rantai pasok makanan yang transparan kepada pemerintah, konsumen, dan perusahaan

produk makanan diperlukan untuk memaksimalkan kualitas makanan dan mengurangi limbah. Distribusi produk dan persediaan dalam jaringan lokal atau global memiliki penelitian ekstensif yang ada. Ini berkisar dari perutean kendaraan, perutean inventaris, dan perutean produksi, hingga distribusi dan penjadwalan transportasi. Kompleksitas masalah ini tidak hanya karena ukuran jaringan, produk, asal, dan tujuan (Accorsi & Manzini, 2019) tetapi terdapat faktor lainnya. Manajemen rantai pasok pertanian dapat dilihat melalui bagan 1. Konsep rantai pasok (SCM) merujuk pada manajemen keseluruhan proses produksi, distribusi dan pemasaran dimana konsumen dihadapkan pada produk-produk yang sesuai dengan keinginannya dan produsen dapat memproduksi produk-produknya dengan jumlah, kualitas, waktu dan lokasi yang tepat (Saptana & Ilham, 2017).

Bagan 1. Manajemen Rantai Pasok Makanan



Sumber: Penulis, 2022

Pertanian ASEAN

Selama beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian di ASEAN telah menurun terhadap pemasukan GDP nasional negara-negara, tetapi masih menjadi sumber pekerjaan yang sangat penting, terutama pada negara-negara berpenghasilan rendah. Pada negara-negara Kawasan ASEAN terdapat lebih dari 100 Juta Petani Kecil yang bergantung kepada pekerjaan sektor pertanian ini sebagai pencarian penghasilan utama dan sumber kehidupan (ERIA, 2012). Salah satu sektor utama pertanian di ASEAN adalah beras. Produksi beras ASEAN telah meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk dan permintaan secara keseluruhan, membantu

menurunkan harga pangan riil dan memperkuat ketahanan pangan (AMAF, 2015).

Pertanian ASEAN bertanggung jawab atas banyak bahan makanan di rantai pasok global, pertanian ASEAN terdapat di antara 2-3 produsen teratas di dunia untuk pangan beras, singkong, minyak sayur, udang, dan kelapa. Namun menurut FAO, Hanya empat negara anggota ASEAN yang memiliki surplus perdagangan pangan bersih. Sebagian besar negara anggota ASEAN masih melakukan perdagangan pangan (impor) makanan dan pakan dari luar negara ASEAN dengan rantai pasokan yang panjang, khususnya gandum, dan kedelai. Oleh karena itu, negara kawasan ASEAN sangat rentan kepada ancaman dan gangguan pada rantai pasok. Keragaman diet juga meningkat di Kawasan ASEAN, Sektor pangan di perkotaan mendorong permintaan protein hewani. Pada tahun 2018, FAO memperkirakan ASEAN memiliki 9,2% kekurangan gizi (2018), 20,4% orang dalam kerawanan pangan sedang hingga parah. Banyak rumah tangga berpotensi rawan pangan jika pekerjaan sehari-hari berhenti atau jika sektor seperti pariwisata terganggu (ERIA, 2012).

Kondisi *agri-food* di ASEAN akibat pandemik COVID-19 pada *sisi pasokan*: Pertama, Kekurangan input (pupuk, benih, pakan, pestisida) untuk pertanian dan akuakultur, yang akan mempengaruhi pengisian kembali stok pangan di negara pengekspor dan pertanian lokal; • Kekurangan tenaga kerja untuk pertanian dan pengolahan makanan karena langkah-langkah untuk membatasi penyebaran virus; Perusahaan-perusahaan pangan pertanian akan gulung tikar; terakhir, Kenaikan harga karena kenaikan umum harga komoditas yang dipicu oleh negara-negara yang bersaing untuk mengurangi produksi, tertundanya distribusi dan penimbunan pangan, misal Nasi. Pada *sisi permintaan*: Pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya permintaan produk pertanian untuk beberapa bahan; kedua, Penutupan semua layanan dan perusahaan yang tidak penting, akibatnya terjadi peningkatan

pengangguran (pekerja yang kehilangan mata pencaharian dan daya beli untuk makanan), dan akibatnya meningkatkan kelaparan dan kekurangan gizi terutama di antara sektor-sektor yang rentan masyarakat seperti pekerja berupah harian dan anak-anak; Ketiga, adanya pandemik menyebabkan pembatasan tinggi mobilitas serta pemaksaan penutupan gerai Makanan & Minuman, yang mengakibatkan potensi limbah makanan yang tinggi, dan “hadiah” ke bank makanan; Penimbunan makanan di rumah tangga (*panic buying* di tingkat nasional)

Sisi rantai pasokan: Rantai pasokan terputus karena kekurangan yang disebabkan oleh pembatasan ekspor atau penimbunan di negara pengekspor; dan pengurangan atau penundaan penanaman tanaman baru yang menyebabkan persediaan tidak terisi; Pada tingkat makro, pengangkutan makanan antara negara pengekspor dan pengimpor telah berkurang karena pengurangan pergerakan kargo melalui angkutan udara, kapal dan truk makanan (Teng, 2020).

Produksi dalam negeri merupakan sumber utama pasokan pangan di wilayah ASEAN di mana produksi biji-bijian dan pangan lainnya, memiliki rata-rata rasio swasembada. Meskipun ketergantungan pada impor cukup rendah di sebagian besar negara-negara tersebut, kecukupan pangan dalam hal produksi pertanian telah dirusak oleh ketidakaturan pola iklim, kebijakan pangan, perdagangan, populasi yang terus meningkat dan masalah kemiskinan, efek globalisasi, dll. Pada kenyataannya, sekitar 80 juta orang masih rawan pangan di negara-negara anggota ASEAN; ketahanan pangan regional adalah perhatian utama bagi semua negara. Apalagi ketahanan pangan masih rapuh karena berdampak buruk bagi masyarakat miskin yang rentan terkena dampak juga oleh lonjakan harga pangan global dan fluktuasi iklim ekonomi, serta diperparah dengan dampak pandemik COVID-19, dan itulah alasan mengapa kerja sama regional pada dasarnya diperlukan dalam menangani masalah ini secara kohesif - kerja

sama regional akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Rantai pasokan makanan Asia Tenggara sudah berisiko mengalami gangguan serius, bahkan sebelum Covid-19 terjadi pada tahun 2019 akhir. Ketahanan pangan sudah menjadi tantangan jangka panjang di Asia Tenggara. Keadaan urbanisasi yang bergerak cepat dan konsumsi yang semakin cepat di seluruh Asia Tenggara membebani rantai pasokan makanan – seperti halnya tren regional seperti angkatan pekerja pertanian yang menua, limbah makanan dengan skala besar, penurunan ketersediaan lahan subur, dan hasil panen yang stagnan (Ellis, 2020). Selain itu, masalah yang dapat menjadi hambatan rantai pasok pertanian adalah kurangnya ketertelusuran, transaksi keuangan yang lebih lambat, pekerjaan manual yang intensif, dan pemalsuan dapat muncul di setiap tahap rantai pasokan, yang negara-negara membuat batasan nyata pada rantai pasokan (LABS, 2020). Dengan ini, dapat dipahami rezim rantai pasok pertanian untuk keamanan pangan memberikan kontrol perbatasan untuk tujuan pengawasan negara. Untuk mencapai kepentingan negara-negara dalam keamanan pangan, sangat penting bagi negara-negara yang untuk bekerja sama satu sama lain dalam rantai pasok pertanian. Untuk alasan ini, telah banyak kesepakatan dibuat yang memberikan pengakuan timbal balik dan pengejaran bersama rezim keamanan pangan nasional dan regional (Altemöller, 2011).

Rezim Pertanian-Pangan

Konsep kerja sama internasional mencakup interaksi antara berbagai jenis aktor negara dan non-negara (yaitu tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga transnasional) dan pada berbagai skala yang ada (yaitu tidak hanya antar dua (2) negara; bilateral, tetapi juga multilateral, regional, global). Perdagangan global memungkinkan makanan yang lebih aman dan lebih terjangkau untuk disediakan bagi banyak konsumen, terlepas dari musim dan area konsumsi (Accorsi & Manzini, 2019). Kerangka kerja sama internasional yang

mengacu di sini mengenai struktur dan proses pembuatan kebijakan di luar negara-bangsa dan digunakan secara sinonim dengan tata kelola global. Konsep kerja sama internasional telah digunakan secara khusus dalam berbagai literatur tentang isu hubungan internasional yang memperdebatkan bagaimana kerja sama muncul dan bertahan dalam sistem internasional yang anarkis-dimana tidak terdapat pemerintahan dunia (Jackson & Sorensen, 2013). Definisi standar adalah bahwa kerja sama terjadi ketika "pelaku menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi orang lain". Oleh karena itu, kerja sama internasional memberikan gambaran dalam interaksi untuk mencapai tujuan bersama ketika preferensi aktor tidak identik (harmoni) atau tidak dapat didamaikan (konflik) (Altemöller, 2011).

Lingkaran perdagangan didefinisikan sebagai serangkaian kontrak berjangka antara perantara dalam rantai pasokan yang memiliki asal produk yang sama. Mereka biasanya merupakan hubungan rantai pasokan integratif dari petani ke pengguna akhir, yang dapat membentuk fondasi pasar perdagangan komersial. Satu perjanjian pasokan integratif kemungkinan akan memicu banyak transaksi *back-to-back* dalam netralisasi risiko posisi. Rantai pasokan makanan global modern dan pasar perdagangan komersial dapat menjadi sangat kompleks dan dapat didasarkan pada aliran produk kontraktual dari petani ke pedagang kecil hingga pedagang besar, dan biasanya berlanjut melalui rantai ke beberapa produsen, pedagang besar, distributor, dan pengecer. Rantai pasokan berbasis serat termasuk petani, ginner, pemintal, penenun, produsen garmen, grosir, dan pengecer.

Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan rantai nilai sektor pertanian telah menjadi isu penting dalam kerja sama pembangunan internasional, baik untuk mempromosikan pembangunan berbasis pasar sektor swasta maupun untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian. Perdagangan makanan dan internasionalisasi manajemen rantai pasokan telah menyebabkan pendekatan pasar yang

kompetitif di tingkat nasional individu. Di tingkat internasional, untuk makanan impor, konsumen jauh lebih tertarik untuk mengetahui negara (asal geografis), sertifikasi standar internasional, masalah etika yang diikuti, dan secara keseluruhan apakah produksi pangan berkelanjutan telah diadopsi atau tidak. Dalam teks berikut, beberapa parameter penting yang mempengaruhi rantai pasokan makanan dibahas. Dalam konteks rantai pasokan, jarak yang ditempuh oleh komoditas pertanian pangan dari petani (produsen) sampai ke meja (konsumen) disebut sebagai "*food miles*". Di sebagian besar negara maju, permintaan konsumen telah meningkat untuk makanan olahan minimal yang telah mengalami lebih sedikit pemrosesan di sepanjang rantai produksi makanan. Akibatnya, kebijakan dan model pertanian baru yang diusulkan untuk rantai pasokan pangan (globalisasi rantai pangan) hanya cukup berhasil di wilayah tertentu. Jadi tantangan yang dihadapi impor dan ekspor dalam rantai pasar internasional ada beberapa (perlunya sertifikasi, pemeliharaan standar internasional, jaminan kualitas, dll).

Sistem pertanian pangan global telah digambarkan sebagai 'seperangkat hubungan yang mengoordinasikan produksi pangan dengan menyelaraskan pilihan yang dibuat oleh produsen, pengecer pengolah, gerai layanan makanan, dan konsumen. Sistem ini telah mengalami periode restrukturisasi yang signifikan yaitu, sementara produksi pangan tetap berada di tingkat lokal dan nasional, tren ke sumber global, pengenalan aturan perdagangan internasional baru, perubahan peraturan negara, bersama dengan peningkatan pengaruh modal ritel transnasional, telah digabungkan untuk mempengaruhi karakter pasar sistem pertanian pangan global. Hubungan kekuatan baru, yang ditentukan oleh tren global menuju pengaturan standar yang didorong oleh pengecer, juga telah muncul.

Teori 'rezim pangan' menyediakan platform untuk mengintegrasikan bidang produksi dan konsumsi dan, dengan demikian, memungkinkan penemuan wawasan baru tentang restrukturisasi pertanian pangan. Teori

rezim pangan membantu menjelaskan kapitalisme di masa lalu, serta 'krisis' neoliberalisme saat ini dan perdebatan seputar masa depan yang positif. sebuah rezim makanan baru dikatakan muncul dari kombinasi kekhawatiran konsumen 'menghijaukan', peningkatan kekuatan supermarket, dan bentuk regulasi baru.

Teori rezim pangan meneliti hubungan antara hubungan internasional produksi dan konsumsi pangan dan bentuk-bentuk khusus akumulasi di bawah kapitalisme sejak tahun 1870-an. Teori rejim pangan mewakili langkah teoretis dari penjelasan linier tentang hubungan pangan dan menempatkan 'hubungan pangan di pusat kluster hubungan yang terdiri dari formasi perkembangan kapitalis yang stabil secara historis'. ini semua berkontribusi pada krisis representasi politik dan legitimasi rezim pangan kedua, di mana ketidakamanan ekonomi global yang dihasilkan berarti restrukturisasi ekonomi pangan dunia. Dengan demikian, rezim makanan tidak selalu tentang makanan, tetapi tentang cara-cara di mana makanan terhubung pada nilai global kapital, sejauh itu adalah pusat reproduksi kerja upahan, dan mungkin merupakan keuntungan yang menguntungkan. industri dengan sendirinya. fokusnya tetap pada pergerakan modal, daripada makanan itu sendiri, yang mewujudkan hubungan modal'.

Penelitian yang ada menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan baru sedang ditempa dalam rantai pasokan pertanian pangan antara produsen, pengecer dan konsumen. Sementara lingkungan mungkin hanya salah satu situs konjungtur dalam hubungan kekuasaan yang muncul, mengakui kegagalan ekologis rezim sebelumnya pasti menimbulkan pertanyaan normatif tentang keberlanjutan hubungan baru, bahwa hubungan kekuasaan antara negara-negara pengimpor dan pengeksport telah membentuk, dan terus membentuk, konstruksi kelas sosial dalam setiap rezim pangan (Smith, Lawrence, & richardS, 2010).

Kerjasama ASEAN pada Rantai Pasok Pertanian

Kawasan ASEAN merupakan salah satu produsen dan pemasok utama biji-bijian di pasar dunia, karena pangsa perdagangan beras Asia Tenggara di pasar global selama 1995-99 adalah sekitar 38% (Teng, 2020). Integrasi pasar pertanian dalam ASEAN menjadi agenda kebijakan utama mengingat tekanan saat ini untuk bergerak menuju pembentukan pasar bersama. Namun proses ini, terbukti tidak dapat dicapai kecuali jika kebijakan dan strategi yang tepat dirancang untuk meredakan masalah ketahanan pangan di antara para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Peningkatan daya saing rantai nilai pertanian mendukung upaya yang lebih luas untuk mencapai ekonomi ASEAN yang kompetitif (Science and Education for Agriculture and Development, 2021).

Kerja sama ASEAN di bidang pertanian dan pangan sudah dimulai sejak tahun 1968 dengan kerja sama di bidang produksi dan pasokan pangan melalui terbentuknya ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF). AMAF memberikan panduan kebijakan dan koordinasi kepada badan-badan cabang di bawah lingkupnya dan melaksanakan Rencana Strategis (SP) dengan memanfaatkan dukungan lembaga-lembaga nasional melalui pengaturan jejaring (AMAF , 2015). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pertanian, maka pada tahun 1977, lingkup kerja sama diperluas untuk mencakup bidang pertanian dan kehutanan yang lebih luas karena kebutuhan pangan semakin meningkat. Saat ini, bidang khusus di bawah kerja sama ASEAN di bidang pertanian dan pangan meliputi ketahanan pangan, keamanan pangan, pangan halal, tanaman pangan, peternakan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, koperasi pertanian, dan kerja sama skema promosi pertanian dan hasil hutan (ASEAN, 2020). Dalam menjalankan kerja sama regional untuk pelaksanaan rantai pasok pertanian, ASEAN melakukan beberapa forum dan kerja sama yang ditampilkan dalam tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Kelompok kerja dan kerja sama ASEAN dalam Sektor Pertanian

No.	Nama	Tahun
1.	Agrcultural cooperation in the area of food production and food supply	1968
2.	ASEAN Food Security (Mengkoordinasikan pertukaran informasi dan evaluasi secara berkala tentang kebijakan pangan di Kawasan ASEAN)	1974
3.	ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB)	1979
4.	ASEAN Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Agricultural Cooperatives	1984
5.	The strengthening of regional cooperation in the development, production, and promotion of agricultural products at the 4th ASEAN Summit; ASEAN Free Trade Area/Common Effective Preferential Tariffs, which applies to processed agricultural products	1992
6.	Joint Committee on ASEAN Cooperation on Joint Approach in Agriculture and Forestry Products Promotion Scheme. (MOU tentang Kerja sama ASEAN dan Pendekatan Bersama dalam Skema Promosi Pertanian dan Hasil Hutan)	1994
7.	ASEAN Sectoral Working Group on Agriculture Training and Extension (memfasilitasi kerja sama dan pertukaran informasi/pengetahuan antar AMS)	1997
8.	ASEAN Sectoral Working Group on Livestock (ASWGL)	1997
9.	ASEAN Sectoral Working Group on Agriculture Cooperative	2000
10.	ASEAN Technical Working Group on Agricultural Research and Development (memberikan masukan kebijakan dan memfasilitasi kerja sama dengan badan-badan ASEAN yang ada untuk jaringan antar pemerintah, bantuan teknis, dan berbagi pengetahuan dalam penelitian dan pengembangan pertanian)	2003
11.	ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (29th November, in Vientiane, Lao PDR), which puts agri-based products as one of ASEAN's Priority Integration Sectors	2004
12.	ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS), 2009-2013	2008
13.	Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in FAF, 2016-2025; AIFS and SPA-FS, 2015-2020; AEC Blueprint 2025 where FAF is included as one of ASEAN's 'Enhanced Sectoral Cooperation'	2015

Sumber: The ASEAN Secretariat, 2020

Dampak pandemik COVID-19 memberikan gangguan pada pasar perjalanan dan rantai pasokan serta potensi risiko pada ketersediaan dan harga produk pangan dan pertanian. Selain itu, pengaruh lainnya adalah terhadap kerja sama ASEAN di bidang pangan dan pertanian. ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) mengeluarkan Pernyataan pada 15

April 2020 untuk menegaskan kembali komitmen untuk memastikan ketahanan pangan, keamanan pangan dan gizi di kawasan selama wabah COVID-19. Ketua AMAF menegaskan bahwa ASEAN akan terus bekerja untuk memastikan pasokan berkelanjutan dari makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan diet populasi ASEAN selama dan setelah pecahnya COVID-19. AMAF berkomitmen untuk meminimalkan gangguan dalam rantai pasokan makanan regional dengan bekerja sama secara erat untuk memastikan bahwa pasar tetap terbuka dan transportasi produk pertanian dan makanan difasilitasi (ASEAN, 2020).

Rencana strategis ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry 2016-2025 menetapkan visi dan tujuan sektor pangan, pertanian, dan kehutanan. Ini, mengidentifikasi dan memprioritaskan bidang utama untuk kerja sama, dan mengusulkan Dorongan Strategis dan Program Aksi. Hal ini dirumuskan dalam konteks global dan regional dan dalam menanggapi perubahan sosio-ekonomi dan demografi yang didorong oleh tiga pendorong utama: pertumbuhan ekonomi yang cepat, integrasi regional dan globalisasi, dan tekanan pada basis sumber daya alam termasuk perubahan iklim.

Visi Kerja sama ASEAN di bidang pertanian dan pangan adalah untuk menciptakan "Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (FAF) yang berdaya saing, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan ekonomi global, berdasarkan pasar tunggal dan basis produksi yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi serta kemakmuran dalam Komunitas ASEAN." (ASEAN, 2020). Enam tujuan telah dirumuskan untuk mencapai Visi tersebut, yaitu:

- Memastikan pertumbuhan yang adil, berkelanjutan dan inklusif
- Pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kelaparan
- Memastikan ketahanan pangan, keamanan pangan, dan nutrisi yang lebih baik
- Memperdalam integrasi regional

- Meningkatkan akses ke pasar global
- Meningkatkan ketahanan terhadap, dan berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi
- perubahan iklim, bencana alam dan guncangan lainnya.

Menurut Rencana Aksi Strategis Kerja sama ASEAN dalam Pangan, Pertanian dan Kehutanan, 2016-2025, bidang prioritas Kerja sama berfokus pada:

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dengan teknologi 'hijau' yang berkelanjutan, sistem pengelolaan sumber daya, dan meminimalkan kerugian dan limbah sebelum dan sesudah panen;
- Meningkatkan fasilitasi perdagangan, integrasi ekonomi dan akses pasar;
- Menjamin ketahanan pangan, keamanan pangan, gizi yang lebih baik dan pemerataan.
- Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, bencana alam dan guncangan lainnya;
- Membantu produsen kecil dan UKM dengan sumber daya terbatas untuk meningkatkan produktivitas, teknologi dan kualitas produk, untuk memenuhi standar pasar global dan meningkatkan daya saing.
- Memperkuat pendekatan bersama ASEAN pada isu-isu internasional dan regional yang mempengaruhi sektor FAF.

Untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kerja sama pangan, pertanian dan kehutanan di ASEAN, telah dibentuk 49 Kelompok Kerja/Kelompok Kerja Pakar dan Satuan Tugas (per Maret 2020) untuk mendukung Pejabat Senior Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (SOM-AMAF) dan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF). Dewan Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN (AFSRB) dibentuk untuk meninjau, memantau, dan mengevaluasi situasi status ketahanan pangan di tingkat global, regional, dan negara. Untuk mendukung kerja AFSRB, Negara-negara Anggota ASEAN sepakat untuk

mengembangkan Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN (AFSIS) dan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga (APTERR) untuk memperkuat kerja sama ketahanan pangan di kawasan melalui pengumpulan, analisis, dan diseminasi yang sistematis informasi terkait ketahanan pangan dan kegiatan pendukung lainnya (ASEAN, 2020).

Pertemuan ke-46 AMAF pada 27 Oktober 2021 sepakat untuk melakukan upaya-upaya dalam menerapkan langkah-langkah pemulihan untuk memastikan pasokan makanan yang cukup dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut mendorong mitra ASEAN untuk mencatat implementasi ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) yang berfungsi sebagai strategi keluar terkonsolidasi dari krisis COVID-19. Melalui pertemuan tersebut dinyatakan bahwa implementasi hasil utama sektor pertanian mengalami kepuasan (The 43rd AMAF, 2021).

Teori rezim internasional menyatakan bahwa dalam mencapai kepentingan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti perjanjian dan aturan. Rezim internasional percaya bahwa seperangkat norma, peraturan dan prosedur dapat mengkoordinasikan perilaku negara-negara. Dengan adanya prinsip dan norma yang berlaku di ASEAN yang tercantum dalam beberapa kegiatan seperti: (i) pengembangan standar dan pedoman pertanian (Good Agriculture Practices (GAP), (ii) implementasi ASEAN Integrated Kerangka Kerja Ketahanan Pangan (AIFS) dan Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan 2015-2020, (iii) pembentukan Climate Resilient Network (CRN) untuk menangani isu perubahan iklim di sektor pangan dan pertanian dan (iv) pembentukan of Grow Asia, sebuah inisiatif antara ASEAN dan World Economic Forum untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas mereka dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi baru, dapat mempengaruhi perilaku negara-negara untuk memperkuat rantai pasok pertanian melalui mobilitas dan logistik pertanian yang mudah.

Meningkatkan Kerja sama Pertanian untuk Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Kerangka kerja global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan target untuk keberlanjutan di berbagai bidang termasuk produksi, konsumsi, pertanian dan nutrisi, kondisi kerja, dan perlindungan lingkungan, seperti yang tercakup dalam SDG poin 2 yaitu *Zero Hunger*, menjadi salah satu target utama dalam pembangunan berkelanjutan, mengupayakan tercapainya ketahanan pangan dengan memastikan tidak ada masyarakat yang mengalami kelaparan (Rudloff & Wieck, 2020; EEA, 2017). Mereka mempromosikan pendekatan terpadu yang didorong oleh kemitraan yang melibatkan banyak aktor termasuk negara dan perusahaan (Rudloff & Wieck, 2020). Kepercayaan dan komunikasi antar mitra dan aktor rantai pasok dapat meningkatkan profitabilitas pertanian dan mengurangi biaya produksi, tidak hanya bekerja secara internal tetapi juga bekerja sama dengan pemasok dan pelanggan pertanian untuk mencapai integrasi eksternal. Aliansi rantai pasok yang baik dapat mengambil keuntungan dari hubungan kepercayaan jangka panjang dengan pemasok pertanian lokal, pasar sayur dan bahan makanan untuk mempromosikan kerja sama yang stabil dengan mitra rantai pasokan dan meningkatkan kapasitas respon dari seluruh rantai (Zhang, Luo, & Li, 2021).

Penerapan Pedoman ASEAN tentang Mempromosikan Investasi Bertanggung Jawab dalam bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan bertujuan untuk mempromosikan investasi Kawasan ASEAN yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi regional, ketahanan pangan dan gizi, keamanan pangan dan manfaat yang adil, sebagaimana serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam kegiatan pemasokan, pemerintahan negara anggota ASEAN harus meningkatkan akses ke layanan keuangan, penyediaan infrastruktur teknis yang diperlukan dan pasokan listrik dan

air yang andal, demi menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk produksi dan bisnis (Herold, 2020). Dalam rantai pasok global terdapat berbagai hambatan, seperti yang dijelaskan dalam buku Accorsi & Manzini, bahwa di tingkat pasar internasional, beberapa gangguan dan risiko telah diidentifikasi di sepanjang rantai pasokan makanan, seperti penipuan makanan, penarikan kembali makanan, penyakit bawaan makanan (munculnya patogen mikroba resisten baru), produksi ilegal makanan “mimik” atau “palsu” dan banyak lainnya. Memang, ada beberapa aliran pemikiran yang mengklaim bahwa konsumen, ketika membeli makanan mereka, mungkin paling tidak tertarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sepanjang rantai pasokan makanan. Kelompok konsumen ini lebih mengkhawatirkan harga/biaya daripada kualitas atau dampak kesehatan. (Accorsi & Manzini, 2019)

Sistem pangan global saat ini adalah campuran yang sangat kompleks, dengan peran utama dimainkan oleh personel industri, LSM, komunitas pertanian, dan pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan termasuk negara harus mendorong pembangunan berkelanjutan dan harus menyadari aliran rantai pasokan (misalnya, asal bahan baku/produk yang dibeli, dipasarkan, dll). Jika pendekatan pemangku kepentingan dalam rantai pasokan sejalan dengan perilaku berkelanjutan, hubungan perusahaan mereka akan jauh lebih tinggi. Jadi pemeliharaan transparansi juga penting, dan baik konsumen maupun pemangku kepentingan tidak boleh mengabaikan produksi berkelanjutan yang diadopsi di sepanjang rantai pasokan. Tentu saja, selain konsumen, komunitas petani juga berada di bawah tekanan besar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas tinggi dan lebih aman dengan biaya yang lebih rendah. Menghubungkan produsen dan konsumen adalah upaya besar yang dilakukan dalam skala global. Secara umum, di sepanjang rantai pasokan, para pemangku kepentingan perlu bekerja dan memeriksa keseimbangan antara biaya kerugian versus pencegahan, berinvestasi

dalam mendirikan fasilitas pemasaran modern, meningkatkan fasilitas pengolahan pangan pertanian, melakukan langkah-langkah untuk mengurangi emisi karbon, menyiapkan model kerja untuk logistik sehingga produk mencapai konsumen dalam waktu minimal (*food miles*), dll. (Accorsi & Manzini, 2019).

Makanan keberlanjutan telah menjadi perbincangan masyarakat global, sebagaimana makanan merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan salah satu faktor yang mendukung tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Paloviita, 2017). Keberlanjutan merupakan faktor penting dalam sektor pangan, karena permintaan yang sangat besar di seluruh dunia. Keberlanjutan di sektor pangan tidak diterima secara global seiring dengan meningkatnya permintaan pangan. Karena risiko bisnis, ketidakpastian, kebijakan pemerintah, teknologi, inovasi, dll. Rantai pasokan makanan beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, dinamis, dan kritis terhadap waktu di mana integritas produk sangat penting. Sistem pangan berkelanjutan adalah struktur yang melakukan konfigurasi ulang, spesialisasi, dan resosialisasi sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan (Aktas & Bourlakis, 2020). Di dukung dalam jurnal Paloviita (2017) yang menyatakan bahwa, pencapaian sistem pangan berkelanjutan merupakan masalah kompleks yang bergantung pada keberhasilan berbagai komponen manajemen rantai pasokan pangan dan kebijakan pangan yang saling berinteraksi. Berbagai sistem tata kelola sistem pangan, termasuk tata kelola swasta yang sebagian besar dipimpin oleh perusahaan dan tata kelola publik yang dipimpin oleh pemerintah, penting dalam membentuk sistem pangan (Paloviita, 2017).

Keberlanjutan pangan mencakup penyediaan pangan yang memadai, aman, terjangkau, dan sehat yang memenuhi kebutuhan gizi dengan cara yang dapat diterima secara budaya dan sosial, sekaligus menjaga sumber daya alam dan membatasi kerusakan lingkungan. Keberlanjutan sistem pangan merupakan hasil interaksi dan pengaruh timbal

balik antara agen yang bertanggung jawab dari berbagai tahapan: pertanian, perusahaan, pemasok barang dan jasa, distributor, perusahaan besar, jasa catering, konsumen, lembaga publik (Accorsi & Manzini, 2019). Perubahan struktural yang dialami oleh sistem pertanian, pangan, dan pedesaan di banyak wilayah selama dekade terakhir sangat mempengaruhi keberlanjutan sistem pangan. Konsep manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan melibatkan pengelolaan bahan, informasi, dan aliran modal antara pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasokan dengan tujuan yang sama dari pembangunan berkelanjutan sosial ekonomi-lingkungan (Accorsi & Manzini, 2019)

Rantai pasokan makanan berkelanjutan, yang sangat penting untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas berbagai macam produk makanan bergizi sepanjang tahun bagi konsumen perkotaan. (Aktas & Bourlakis, 2020). Untuk menjamin ketahanan pangan, bukan volume produksi atau konsumsi pangan tetapi keragaman/diversifikasi pangan yang berdampak. Dalam laporan oleh FAO (2016), Perusahaan yang beroperasi di sepanjang rantai pasokan pertanian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja dan menghadirkan keahlian, teknologi, dan kapasitas pembiayaan untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan rantai pasokan. Hal ini dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dan membantu mencapai tujuan pembangunan negara tuan rumah. Prinsip-prinsip perilaku bisnis yang bertanggung jawab (RBC) yang disepakati secara internasional bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. (OECD/FAO, 2016)

Keberlanjutan merupakan faktor penting dalam sektor pangan, karena permintaan yang sangat besar di seluruh dunia. Keberlanjutan di sektor pangan tidak diterima secara global seiring dengan meningkatnya permintaan

pangan. Karena risiko bisnis, ketidakpastian, kebijakan pemerintah, teknologi, inovasi, dll. Rantai pasokan makanan beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, dinamis, dan kritis terhadap waktu di mana integritas produk sangat penting. Sistem pangan berkelanjutan adalah struktur yang mengonfigurasi ulang, mengatur spasial, dan mensosialisasikan kembali sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Pencapaian sistem pangan berkelanjutan merupakan masalah kompleks yang bergantung pada keberhasilan berbagai komponen manajemen rantai pasokan pangan dan kebijakan pangan yang saling berinteraksi. Berbagai sistem tata kelola sistem pangan, termasuk tata kelola swasta yang sebagian besar dipimpin oleh perusahaan dan tata kelola publik yang dipimpin oleh pemerintah, penting dalam membentuk sistem pangan.

Peningkatan ketahanan pangan dapat dicapai dengan meningkatkan ketersediaan melalui perluasan area produksi pangan pokok, peningkatan produktivitas praktik pasca panen, peningkatan akses dan peningkatan stabilitas melalui manajemen rantai pasokan pertanian (Aji, 2020). Membentuk rezim pangan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, ASEAN sebagai Kawasan regional perlu bekerjasama untuk mencapai ketahanan pangan secara nasional di negara-negara anggota ASEAN (Teng, 2020).

KESIMPULAN

Ketahanan pangan merupakan isu penting global karena makanan menjadi kebutuhan dasar tiap manusia. Dalam mencapai ketahanan pangan, pergerakan rantai pasok pangan pertanian yang baik sangat diperlukan demi tercapainya akses makanan ke seluruh masyarakat. Manajemen rantai pasokan makanan mencakup arena lokal, regional, nasional dan internasional. ASEAN sebagai Kawasan memiliki sepuluh negara anggota telah melakukan berbagai bentuk kerja sama regional untuk mencapai terpenuhinya keamanan pangan yang berkelanjutan dengan meningkatkan akses dan distribusi ke makanan, memproduksi dan mengirimkan makanan aman

dan bernutrisi, mengurangi limbah makanan, memastikan mitigasi, dan adaptasi ramah lingkungan melalui kerja sama rantai pasok pertanian yang efektif dan terintegrasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu fondasi penting dalam berkontribusi pada ketahanan pangan dan mencapai pembangunan berkelanjutan di Kawasan ASEAN. Artikel ini menyatakan bahwa kerja sama ASEAN merupakan salah satu bentuk rezim dimana negara-negara bekerja sama melalui forum dan organisasi internasional demi wujudkan ketahanan dan kesejahteraan pangan di Kawasan ASEAN. Ketahanan pangan nasional merupakan hal penting tiap negara, dengan kondisi pandemik saat ini, rantai pasok makanan bidang pertanian menjadi terganggu, maka dari itu, ASEAN semakin memperkuat kerja sama dengan membuka pintu perdagangan seluasnya. Rezim internasional membentuk perilaku negara di regional ASEAN melalui prinsip, norma dan prosedur yang dituang dalam bentuk kerja sama, visi misi ASEAN, Rencana Aksi Strategis Kerja sama ASEAN dalam Pangan, Pertanian dan Kehutanan, badan-badan penunjang pertanian, dan lain-lain. Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN adalah menjaga perdagangan terbuka dan konektivitas rantai pasokan, memperluas produksi pangan intra-regional, memperpendek rantai pasokan makanan; Menjamin ketersediaan input pertanian bagi petani; Memperkuat keamanan kepemilikan lahan; Memfasilitasi manajemen risiko yang lebih baik bagi petani kecil, Mendorong produser pertanian menggunakan teknologi sesuai perkembangan zaman seperti 3IR, 4IR, Gtech, foodtech, dan fintech.

DAFTAR PUSTAKA

- Accorsi, R., & Manzini, R. (2019). *Sustainable Food Supply Chains*. London: Elsevier Inc. doi:<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813411-5.00017-X>
- Adrianta, I., M.Simatupanga, T., & Handayat, Y. (2021). The barriers of responsible agriculture supply chain: The relationship between organization capabilities, external

- actor involvement, and supply chain integration. *Uncertain Supply Chain Management*, 9, 403–412. doi:10.5267/j.uscm.2021.2.003
- Aji, J. M. (2020). Linking Supply Chain Management and Food Security: A Concept of Building Sustainable Competitive Advantage of Agribusiness in Developing Economies. *E3S Web of Conferences (ICALS 2019)*, 142. doi:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202014206005
- AMAF . (2015). *VISION AND STRATEGIC PLAN FOR ASEAN COOPERATION IN FOOD, AGRICULTURE AND FORESTRY (2016-2025)*. Makati: ASEAN.
- Aktas, E., & Bourlakis, M. (2020). *Food Supply Chains in Cities*. Cham: Palgrave Macmillan. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-34065-0
- Altemöller, F. (2011). Towards an international regime of supply chain security: an international relations perspective. *World Customs Journal*, 5(2), 21-33.
- ARI, P. T. (2018). *THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS I*. Eskişehir: Anadolu University.
- Altemöller, F. (2011). Towards an international regime of supply chain security: an international relations perspective. *World Customs Journal*, 5(2).
- ASEAN. (2020). *ASEAN Food, Agriculture and Forestry*. Retrieved from ASEAN Secretariat: <https://asean.org/our-communities/economic-community/enhanced-connectivity-and-sectoral-development/asean-food-agriculture-and-forestry/>
- ASEAN. (2020, April 17). *ASEAN pledges to ensure food security during COVID-19 outbreak*. Retrieved from The ASEAN Secretariat: <https://asean.org/asean-pledges-to-ensure-food-security-during-covid-19-outbreak/>
- Banker, S. (2021, June 29). *The Circular Supply Chain: A Push For Sustainability*. Retrieved from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/stevebanker/2021/06/29/the-circular-supply-chain-a-push-for-sustainability/?sh=6ca8bb4c37c1>
- Beddington, J. R., Asaduzzaman, M., Bremauntz, F. A., Clark, M. E., Guillou, M., Jahn, M. M., . . . al, e. (2012, March). Achieving food security in the face of climate change: final report from the Commission on Sustainable Agriculture and Climate Change. *HAL Id: hal-02807678*.
- Burch, D., & Lawrence, G. A. (2009, December). *owards a Third Food Regime: Behind the Transformation*. *Agriculture and Human Values*, 26(4). doi:10.1007/s10460-009-9219-4
- Bourlakis, M. A., & Weightman, P. W. (2004). *Food Supply Chain Management*. Hong Kong : Blackwell Publishing Ltd.
- EEA. (2017). *Food in a green light — A systems approach to sustainable food*, European Environment Agency, Copenhagen. Copenhagen: Office of the European Union. doi:10.2800/884986
- Ellis, J. (2020, April 14). *Covid-19 will compound ASEAN's long-term food security challenges – new report*. Retrieved from AgFunder Network Partners: <https://agfundernews.com/covid-19-will-compound-aseans-long-term-food-security-challenges-new-report.html>
- ERIA. (2012, December 26). *Enhancing Supply Chain Connectivity and Competitiveness of ASEAN Agriculture Products: Identifying Chokepoints and Opportunities for Improvement*. Retrieved from Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: <https://www.eria.org/research/enhancing-supply-chain-connectivity-and-competitiveness-of-asean-agriculture-products-identifying-chokepoints-and-opportunities-for-improvement/>
- ERIA. (2020, September 03). *ASEAN on Point Public Forum: Ensuring the Resilience and Sustainability of the Agriculture and Food Sector in ASEAN in the Context of COVID-19*. Retrieved from Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: <https://www.eria.org/research/asean-on-point-public-forum-ensuring-the-resilience-and-sustainability-of-the-agriculture-and-food-sector-in-asean-in-the-context-of-covid-19/>
- Haristanto; Putranti, N. A. I. R. (2015). CTPAT dan Global Supply Chain Security. *Journal of Diplomacy and International Studies*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>
- Herold, J. (2020). *Agricultural value chains in development cooperation. Analyses and recommendations*. University of Duisburg-

- Essen. Duisburg: Institute for Development and Peace (INEF).
- Hirawan, F. B., & Verselita, A. A. (2020, April). Kebijakan Pangan di Masa Pandemi COVID-19. *CSIS Commentaries DMRU-048-ID*.
- Haristanto; Putranti, N. A. I. R. (2015). CTPAT dan Global Supply Chain Security. *Journal of Diplomacy and International Studies*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>
- IISD. (2018, December 6). *G20 Declaration Focuses on Fair, Sustainable Development*. Retrieved from International Institute for Sustainable Development: <https://sdg.iisd.org/news/g20-declaration-focuses-on-fair-sustainable-development/>
- Janakiraman, A. (2021, September 8). *Rice crop: A vital cog in ensuring food security*. Retrieved October 31, 2021, from Open Access Government: <https://www.openaccessgovernment.org/ensuring-food-security/119387/>
- Keohane, Robert O. (1993), "The Analysis of International Regimes, Toward a European American Research Programme," In Volker Rittberger (ed.) *Regime Theory and International Relations*. New York: Oxford University Press pp. 23-45.
- KPMG International. (2013). *The agricultural and food value chain: Entering a new era of cooperation*. Swiss: KPMG International Cooperative. Retrieved from <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2013/06/agricultural-and-food-value-chain-v2.pdf>
- Krasner, Stephen D. (1991), "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables," In Stephen D. Krasner (ed.) *International Regimes*. London: Cornell University Press, pp. 1-21.
- LABS, [. (2020, June 30). *Overcoming Supply Chain Challenges in Agriculture with Digital Technologies*. Retrieved from [xcubelabs: https://www.xcubelabs.com/blog/overcoming-supply-chain-challenges-in-agriculture-with-digital-technologies/](https://www.xcubelabs.com/blog/overcoming-supply-chain-challenges-in-agriculture-with-digital-technologies/)
- Lambert, S. R., Elamin, N. E., & Cordoba, S. F. (2020). *Maximizing sustainable agri-food supply chain opportunities to redress COVID-19 in developing*. Division on International Trade and Commodities. United Nations Conference on Trade and Development.
- Meiches, B., & Hopkins, R. (2012). *Regime Theory*. doi:<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.472>
- OECD/FAO . (2016). *OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains*. Paris: OECD Publishing. doi:<http://dx.doi.org/10.1787/9789264251052-en>
- Okitasari, H., Kasih, P. H., Mauliddina, Y., & Safrudin, Y. N. (2021). Food Agriculture Supply Chains during a Pandemic . *Journal of Logistics and Supply Chain volume*, 49-56.
- Paloviita, A. (2017). Food Security Is None Of Your Business? Food Supply Chain Management In Support Of A Sustainable Food System. *OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT*, 10(2), 100-108.
- Partogi, S. (2021, January 21). *Govt has room for food systems improvement*. Retrieved from The Jakarta Post: Sebastian Partogi (The Jakarta Post) This article was published in [thejakartapost.com](https://www.thejakartapost.com/news/2021/01/14/indonesia-lacks-grand-strategy-for-nationwide-) with the title "Govt has room for food systems improvement". Click to read: <https://www.thejakartapost.com/news/2021/01/14/indonesia-lacks-grand-strategy-for-nationwide->
- Perdana, T., & Hermiatin, F. R. (2019). Rantai Pasokan Cerdas; Menyajikan Peluang yang Belum Pernah Ada Sebelumnya untuk Mengelola Rantai Pasokan Pertanian. *Energy & Engineering (EE)* , 2(4). doi:10.32734/ee.v2i4.685
- Peterson, M. J. (2012, December 21). *International Regime as Concept*. *E-International Relations* , 1-6.
- Ponciano S. Intal, J., Oum, S., & Simorangkir, M. J. (2011). *Agricultural Development, Trade & Regional Cooperation in Developing East Asia*. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations* (fifth ed.). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Rudloff, B., & Wieck, C. (2020, September). *Sustainable Supply Chains in the Agricultural Sector: Adding Value Instead*. doi:10.18449/2020C43
- Saptana, & Ilham, N. (2017, Juni). Supply Chain Management of Cattle and Beef Commodities . *Analisis Kebijakan*

- Pertanian*, 15(1), 83-98.
doi:<http://dx.doi.org/10.21082/akp.v15n1.2017>
- Science and Education for Agriculture and Development. (2021). *Agricultural Transformation and Market Integration in the ASEAN Region: Responding to Food Security and Inclusiveness Concerns*. Laguna: Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture.
- Sitorus, B., & Sitorus, T. I. (2017, Juli). Dukungan Transportasi Logistik dan Daya Saing Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 4(2).
- Sjah, T., & Zainuri, Z. (2020). Agricultural Supply Chain and and Food Security. In W. L. (eds., *Zero Hunger* (pp. 1-10). Mataram, Indonesia: Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. doi:10.1007/978-3-319-69626-3_82-1
- Smith, K., Lawrence, G., & richardS, c. (2010). Supermarkets' Governance of the Agri-food Supply. *Int. Jnl. of Soc. of Agr. & Food*, 17(2), 140-161.
- Sweeney, E., & Waters, D. (2021). *Global Logistics* (8th ed.). London: Kogan Page Limited.
- Syuaib, M. F. (2016). Sustainable agriculture in Indonesia: Facts and challenges to keep growing in harmony with environment. *Agricultural Engineering International: CIGR Journal*, 18(2), 170-184.
- Teng, P. P. (2020). Ensuring the resilience and sustainability of the agriculture and food sector in ASEAN in the context of COVID-19. *ASEAN on Point*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
- The 43rd AMAF. (2021). *THE FORTY-THIRD MEETING OF THE ASEAN MINISTERS ON AGRICULTURE AND FORESTRY*. Jakarta: INDONESIA VIDEO CONFERENCE.
- United Nations Children's Fund (UNICEF), W. H. (2019). *Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2019 Edition*. Geneva: World Health Organization. doi:Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- Weightman, P. W. H., & Bourlakis, M. A. (Eds.). (2004). *Food Supply Chain Management*. Wiley.
- Wright, G. (n.d.). *What is supply chain security and how does it work?* SearchERP. Retrieved November 18, 2021, from <https://searcherp.techtarget.com/definition/supply-chain-security>
- Williams, J. (2014). *Agricultural Supply Chains and the Challenge of Price Risk*. New York: Routledge.
- Zhang, J., Luo, J., & Li, J. (2021). Agricultural co-operatives participating in supply chain integration in China: A qualitative comparative analysis. *PLoS ONE*, 16(4). doi:<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250018>

BIOGRAFI

Putri Saviera Quaralia adalah mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara. Periset tertarik mengenai isu pembangunan berkelanjutan.